

# NILAI KEADILAN DALAM POLIGAMI

**Dodon Alfiander**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: dodonalfiander@uinmybatusangkar.ac.id

**Abstract:** *This study examines the value of justice in polygamy from various perspectives, namely the Qur'an, Sunnah, ushul fiqh/fiqh, and positive law. This research is a literature study with data sources in the form of polygamy provisions contained in the Al-Qur'an, Sunnah, ushul fiqh/fiqh, and positive law. In addition, data were also taken from literature related to polygamy. Using a normative approach, this research finds that fairness is an important condition for polygamy. The concept of justice in the Qur'an tends to be related to business that is humanly possible. If someone really wants to do justice with a sincere goal, then he will not be able to do it considering his limitations as a human being. In principle, the concept of fairness in sunnah and ushul fiqh/fiqh refers to the interpretation of the Koran, namely fairness in the areas of living, muamalah, association, and night shifts. Meanwhile, justice in positive law basically emphasizes the husband's ability to be fair to his wives and children, especially in terms of subsistence. This research shows that in both Islamic law and positive law, justice is an important condition that must be met by a husband in polygamy.*

**Keywords:** *Justice; Polygamy, Ushul Fiqh, Fiqh, Positive Law.*

## PENDAHULUAN

Persoalan poligami bukanlah merupakan kajian yang baru. Hal ini telah ada dalam kehidupan manusia semenjak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian juga dengan masyarakat lain di sebahagian besar kawasan dunia. Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka akan ditemukan bahwa poligami merupakan jalan hidup yang telah diterima. Bahkan di kalangan bangsa Arab sebelum Islam telah dipraktikkan poligami tanpa batas. Namun setelah Islam datang, praktek poligami tidaklah dihapuskan secara total, akan tetapi membatasi jumlah perempuan yang boleh untuk dinikahi dengan syarat yang sangat berat yaitu keharusan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan keluarganya.

Keadilan dan poligami merupakan dua hal yang sejak dahulu kala menarik untuk diperbincangkan. Poligami adalah sebuah isu yang kontroversial di masyarakat, di sisi lain keadilan adalah kajian yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun dua hal yang berbeda, dalam poligami sesungguhnya melekat diskursus keadilan (Adlhiyati & Achmad, 2020). Keadilan dalam kaitannya dengan poligami sampai dengan saat ini masih terus dan senantiasa diperbincangkan, khususnya ketika melihat adanya problematika di seputar praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Secara sosiologis, sebagian besar mereka-mereka yang melakukan praktek poligami terlihat tidak dapat dengan baik mewujudkan keadilan syariat poligami dalam kehidupan rumah tangga (Sippah Chotban, 2016).

## METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi Pustaka. Studi ini menggunakan pendekatan normative dengan mengkaji ketentuan adil dalam hukum islam dan hukum positif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data berupa ketentuan-ketentuan poligami yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, ushul fiqh, dan hukum positif. Selain itu, data juga diambil dari literatur-literatur terkait dengan poligami. Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur terkait. Data direduksi, disajikan, dianalisis kemudian disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata "poly" atau "polus" yang artinya "banyak" dan kata "gamain" atau "gamos" yang bermakna "kawin" atau "perkawinan." Karena itu jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas, atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama (Yanto et al., 2018). Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah isteri dalam poligami, tetapi dalam Islam membatasi sampai empat orang, jika ada keinginan suami untuk menambah lagi, maka salah satu dari yang empat tersebut harus diceraikan sehingga jumlahnya tetap empat (Bibit Suprpto, 1996).

### 1. Adil dalam Poligami: Tinjauan Al-Qur'an.

Islam meletakkan soal poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau diisyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Poligami ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan diakui dalam kehidupan manusia (Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshary, 1996). Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* memiliki konsep poligami yang jelas. Konsep tersebut Allah jelaskan dalam kitabNya, dan ini yang menjadi landasan yuridis disyari'atkannya poligami. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3)”

Asbab al-Nuzul surat An-Nisa ayat 3 di atas adalah didasarkan pada sebuah hadis dari Urwah Ibn Zubair yang bertanya kepada 'Aisyah tentang firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 3 tersebut, maka 'Aisyah menjawab bahwa anak yatim yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah perempuan yatim yang berada di bawah

pengampuan walinya, dimana harta kekayaannya bercampur dengan harta walinya, sedangkan wali tersebut tertarik dengan harta dan kecantikannya serta ingin untuk menikahnya. Akan tetapi wali tersebut tidak mau memberikan mahar kepada perempuan tersebut secara adil yaitu memberikan mahar yang sama jumlahnya dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Oleh karena itu wali seperti ini dilarang untuk menikahi mereka kecuali jika ia bisa berlaku adil kepada mereka dengan memberikan mahar yang lebih tinggi dari biasanya. Jika tidak bisa berbuat seperti itu, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disenangi (M. Quraisy Syihab, 2002).

Merupakan suatu fakta historis bahwa umat-umat terdahulu telah melakukan apa yang dinamakan poligami. Namun poligami di berbagai suku bangsa tersebut tidak dibatasi, sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya, lalu turunlah Q.S. surat An-Nisa ayat 3 sehingga seorang suami hanya boleh mempunyai isteri empat orang. Dalam riwayat lain juga menjelaskan tentang asbab al-nuzul surat An-Nisa ayat 3 di atas adalah ketika seorang laki-laki mempunyai anak yatim yang berada di bawah pengampuannya dan ia tidak mau berlaku adil terhadap dirinya, maka turunlah ayat ini. Adapun riwayat tersebut terdapat dalam sebuah hadis sebagai berikut:

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى (وان خفتن أن لاتقسطوا في اليتامى) فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحو ما طاب لهم من النساء سواهن) رواه البخاري

*Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Sa'id dari Shaleh bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Zubair bahwa ia telah bertanya kepada 'Aisyah ra. Tentang firman Allah (surat An-Nisa ayat 3) lalu 'Aisyah berkata: "Wahai anak saudariku maksudnya adalah anak yatim yang berada dalam pengampuan walinya, lalu walinya hendak menikahnya karena harta dan kecantikannya dengan mahar yang tidak sesuai dengan ketetapan sunnah, maka mereka dilarang untuk menikahnya kecuali jika ia berlaku adil dan menyempurnakan maharnya dan menyarankan mereka untuk menikahi wanita yang sepadan selain mereka (anak yatim). (H.R. Bukhari) (Mughir, n.d.).*

Beberapa ulama Zhahiri mengatakan bahwa kata-kata Al-Quran *Matsna* berarti "dua-dua", *Tsulasta* berarti "tiga-tiga", dan *Ruba'* berarti "empat-empat", sehingga dengan demikian jumlah yang diizinkan menggembung menjadi delapan belas. Ada

pula yang berpandangan bahwa *matsna wa stulasta wa ruba* dijumlahkan menjadi sembilan, sehingga Islam mengizinkan poligami sampai sembilan orang. Sesungguhnya ini merupakan penafsiran ayat Al-Quran yang salah. Sementara penafsiran Nabawi atas ayat ini tercantum dalam hadits Nabi SAW, yaitu: "sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda : Ghaylan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah memeluk Islam dan memiliki sepuluh orang Isteri: "pilihlah empat orang dari mereka dan ceraikan yang lain".

Ayat 3 surat An-Nisa menggunakan kata (تقسطوا) dan (تعدلوا) yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqshithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Adapun keadilan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun jika seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus, maka ia tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia (M. Quraisy Syihab, 2002). Kelemahan manusia dalam hal ini digambarkan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa: 129, yaitu:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung... (Q.S. An-Nisa : 129)*

Syeikh Muhammad bin Sirrin disaat menjelaskan ayat ini berkata bahwa ketidakmampuan yang disebutkan dalam Al-Quran inilah bertalian dengan cinta kasih dan hubungan nafkah bathin. Sementara Syeikh Abu bakar bin Al-Arabi berpendapat bahwa: "tak seorangpun yang dapat mengendalikan rasa hatinya, karena ia sepenuhnya berada dalam kekuasaan Ilahi. Berdasarkan surat An Nisa ayat 129, oleh sebagian orang dicoba untuk dijadikan dalil untuk mengharamkan poligami, padahal masalahnya tidak demikian. Syari'at Allah itu bukan permainan, yang mensyariatkan suatu urusan dalam suatu ayat dan mengharamkannya dalam ayat lain. Keadilan yang dituntut dalam ayat pertama yang menyatakan terlarangnya poligami bila dikhawatirkan keadilan itu tidak terealisasi adalah keadilan dalam muamalah, pemberian nafkah, pergaulan, dan seluruh urusan lahiriah, di mana tidak seorang isteri pun dikurangi haknya dalam urusan ini dan tidak seorang pun dari mereka yang lebih diutamakan daripada yang lain (Sayyid Quthb, 2002).

Ayat 129 diturunkan sehubungan dengan Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq, isteri Rasulullah SAW. Rasulullah mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap isteri-isteri yang lain. Oleh sebab itu, setiap saat Rasulullah SAW berdoa: "Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku. Janganlah engkau memaksakan sesuatu yang menjadi perintah-Mu di atas kemampuan yang ada pada diriku." Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriah bisa berbuat adil terhadap

isteri-isterinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah karena satu-satunya isteri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Namun demikian kecendrungan terhadap satu isteri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap yang lain (Mudjab Mahali, 2002).

Surat An-Nisa ayat 129 ini merupakan ayat yang berhubungan dengan surat An-Nisa ayat 3. Allah menciptakan jiwa manusia itu menurut fitrahnya memiliki beberapa kecendrungan yang tidak dapat dikuasanya. Kecendrungan ini adalah kecendrungan hati manusia kepada salah seorang isterinya dan lebih mengutamakan dari isteri-isteri yang lain.

## 2. Adil dalam Poligami: Tinjauan Sunnah.

Setelah turunnya surat An-Nisa ayat 3 tersebut, tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membatasi sampai empat orang isteri. Hal ini dapat dipahami dari kisah Ghailan yang masuk Islam di masa Nabi SAW, sedangkan ia memiliki isteri yang banyak. Ketika ia mengatakan hal itu kepada Nabi SAW lalu Nabi memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang di antaranya dan menceraikan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, yaitu:

عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه ، فأمر النبي ص.م . أن يتخير أربعاً منهن (رواه الترمذي)

*Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Ghailan Ibn Salamah al-Tsaqafi yang telah masuk Islam dan memiliki sepuluh orang Isteri ketika ia masih Jahiliyyah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang isteri dari mereka dan menceraikan yang lainnya. (H.R. At-Turmudzi).*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam membolehkan berpoligami sampai empat orang isteri, dengan persyaratan yaitu dapat berlaku adil sebagaimana yang disyaratkan oleh surat An-Nisa ayat 3. Sementara dalam riwayat lain juga dikatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman dalam bukunya Perkawinan dalam Syari'at Islam, dari Qais bin Harits, sebagai berikut:

عن قيس ابن الحارث قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة فاتيت النبي ص.م . فذكرت ذلك له فقال أختر منهن أربعاً  
 Dari Qais bin Harits ia berkata : Aku masuk Islam sedang aku memiliki delapan isteri, lalu aku menghadap Rasulullah SAW, kemudian kuterangkan kepadanya hal itu, lalu beliau bersabda : "pilihlah empat di antara mereka".(H.R. Abu Daud)

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa poligami boleh dilakukan. Kebolehan untuk melakukan poligami terlihat dari pembatasan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memilih empat orang isteri saja, dan menceraikan yang lainnya.

### 3. Adil dalam Poligami: Tinjauan Ushul Fiqh/ Fiqh.

Islam telah menjadikan poligami sebagai sesuatu perbuatan yang mubah, bukan sunnah, bukan pula wajib (Fajar, 2014). Dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah SWT telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal ini, yaitu: "*Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.*" (Q.S. An-Nisa: 3)

Namun demikian, kebolehan poligami pada ayat di atas tidaklah harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebagaimana yang digambarkan pada bagian *asbab al-nuzul* ayat tersebut. Sebab sebagaimana sudah dipahami dalam ilmu ushul fiqh, yang menjadi pegangan adalah bunyi redaksional ayat yang bersifat umum (*fankihuu maa thaab lakum mina an-nisaa` dst*), bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Jadi poligami boleh dilakukan baik oleh orang yang mengasuh anak yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Kaidah ushul fikih menyebutkan: *Idza warada lafzhul 'umuum 'ala sababin khaashin lam yusqith 'umumahu*. Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya (Abdul Qadir Ad-Dumi tsumma Ad-Dimasyqi, 1995).

Kemudian terhadap pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tersebut (empat orang). Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat 3 surat An-Nisa yang mana dibarengi dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka ia telah berbuat aniaya.

Adapun keadilan yang merupakan kewajiban dalam poligami sebagaimana yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3, adalah keadilan dalam nafkah dan mabit (giliran bermalam). Nafkah tujuannya adalah mencukupi kebutuhan para isteri yaitu mencakup sandang (*al-malbas*), pangan (*al-ma`kal*), dan papan (*al-maskan*). Sedang mabit, tujuannya bukanlah untuk jima' (bersetubuh) semata, melainkan untuk menemani dan berkasih sayang (*al-uns*), baik terjadi jima' atau tidak. Jadi suami dianggap sudah memberikan hak mabit jika ia sudah bermalam di sisi salah seorang isterinya, walaupun tidak terjadi jima'. Yang dimaksud "adil" bukanlah "sama rata" (secara kuantitas), melainkan memberikan hak sesuai keadaan para isteri masing-masing. Namun kalau suami mau menyamakan secara kuantitas juga boleh, namun ini sunnah, bukan wajib. Isteri pertama dengan tiga anak, misalnya, tentu kadar nafkahnya tidak sama secara kuantitas dengan isteri kedua yang hanya punya satu anak. Dalam hal mabit (bermalam), wajib sama secara kuantitas antar para isteri. Namun isteri yang sedang menghadapi masalah misalnya sedang sakit atau stres, dapat diberi hak mabit lebih banyak daripada isteri yang tidak menghadapi masalah, asalkan isteri lainnya ridha.

Adapun "adil" dalam surat An-Nisa: 129 yang mustahil dimiliki suami yang berpoligami, maksudnya bukanlah "adil" dalam hal nafkah dan mabit, melainkan adil

dalam "kecenderungan hati". Terhadap permasalahan adil sebagai syarat kebolehan untuk berpoligami ini, menurut Prof. K.H. Ibrahim Hosen yang dalam hal ini meneliti pendapat ulama fiqh tentang kebolehan poligami, yaitu Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya. Karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, dengan pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohnya wudhu' selaku syarat hukum sahnya dalam menunaikan shalat, dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak akan sah dilakukan kecuali dengan wudhu' terlebih dahulu. Maka shalat dengan wudhu' tidak dapat dipisahkan. Sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami. Selain daripada itu syarat hukum itu mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian halnya, melainkan ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada hakim perkaranya dan hakim pun dapat menjatuhkan kepadanya hukuman. Akan tetapi jikalau adil menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal (Ibrahim Hosen, 1971).

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah (keringanan). Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.

#### 4. Adil dalam Poligami: Tinjauan Hukum Positif di Indonesia.

Adapun Monogami, sebagai asas yang dianut oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dahulu pernah menjadi pembicaraan masyarakat ramai dikarenakan ada pihak yang setuju dan di lain pihak ada yang tidak setuju dengan dicantumkannya monogami sebagai salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang hendak diciptakan (Sippah Chotban, 2016). Kemudian menjadi suatu kenyataan bahwa monogami menjadi salah satu asas, tetapi dengan suatu pengecualian, yaitu yang hanya ditujukan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asas dalam perkawinan adalah monogami. Hal ini terdapat pada pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dapat dipahami bahwa asas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah monogami absolut, melainkan bersifat pengarahan kepada bentuk perkawinan monogami, dan bukan menghapus monogami sama sekali. Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami adalah sebagai alternatif (Ahmad Rafiq, 1998).

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bagi seorang suami yang bermaksud menikah lagi harus mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang kepada pengadilan dengan memperlihatkan (menunjukkan) surat izin dari isterinya serta mengemukakan alasan-alasan yang tepat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim (Adlhiyati & Achmad, 2020).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Adanya perjanjian dari suami atau isteri-isteri.
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pada ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 40 menyebutkan: "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan".

Sementara di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 56 disebutkan bahwa:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.



Dapat dipahami bahwa dalam hal ini melibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi ditentukan oleh "individu affair" (kepentingan pribadi). Selain syarat-syarat di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini juga diatur dalam KHI pasal 55 yang menjelaskan bahwa:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu merlakukan adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin untuk dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari seorang.

Di samping ketentuan di atas, KHI juga menjelaskan pada pasal 58, yaitu :

- a. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. Tahun 1974 yaitu:
  - 1) Adanya persetujuan isteri.
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1974 persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan itu dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang di Pengadilan Agama.
- c. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian hakim.

Berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya merupakan syarat yang utama yang mesti bagi suami untuk berpoligami. Bila suami merasa khawatir atau tidak mungkin untuk dipenuhi (berlaku adil) maka dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan berpoligami. Apabila seorang tidak yakin akan mampu untuk berbuat yang seimbang dalam memenuhi hak-hak mereka, maka laki-laki tersebut tidak boleh mempunyai lebih dari seorang isteri. Jika laki-laki itu merasa hanya mampu memenuhi kewajiban kepada seorang isteri saja, diapun tidak boleh menikahi yang kedua, selanjutnya jika laki-laki itu hanya dapat berlaku adil hanya kepada dua orang isteri saja, maka dia tidak boleh menikahi yang ketiga, batas akhir adalah empat apabila irasa perlu untuk melakukannya.

Salah satu penyebab pembatasan poligami yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami karena pada lahirnya kemampuan suami untuk berlaku adil, membayar nafkah, pembagian waktu dan sebagainya hanya sampai empat orang isteri dengan pengaturan mingguan dalam satu bulan, lebih dari itu disangsikan suami tidak memperhatikan sempurna dan tidak sanggup

memunaikan hak-hak isteri-isterinya, karena itu kebolehan berpoligami setidaknya harus memenuhi dua persyaratan, yaitu:

- a. Berlaku adil antara isteri-isteri dan anak-anaknya, sesuai dengan QS. An-Nisa: 3.
- b. Kesanggupan membayar nafkah atau belanja nafkah rumah tangga.

## KESIMPULAN

Adil merupakan syarat penting dalam poligami. Konsep adil dalam Al-Quran cenderung dalam kaitannya hubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Jika seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus, maka ia tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia. Konsep adil dalam sunnah dan ushul fiqh/fiqh pada prinsipnya merujuk pada penafsiran terhadap Al-Quran, yaitu adil dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Sedangkan adil dalam hukum positif pada dasarnya menekankan kepada kemampuan suami untuk berlaku adil pada istri-istri dan anak-anak, terutama dalam hal nafkah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum islam maupun hukum positif, adil merupakan syarat penting yang wajib dipenuhi oleh seorang suami dalam berpoligami.

## REFERENSI

- Abdul Qadir Ad-Dumi tsumma Ad-Dimasyqi. (1995). *Nuzhatul Khathir Syarah Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir*. Dar Ibnu Hazm.
- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Ahmad Rafiq. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bibit Suprpto. (1996). *Lika-Liku Poligami*. Al-Kautsar.
- Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshary. (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. PT. Pustaka Firdaus.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. (1987). *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT. Bina Aksara.
- Fajar, M. S. (2014). KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM ( TINJAUAN MULTIDISIPLINER DALAM KASUS POLIGAMI ). *Al-'Adalah*, 12(116), 33–48.
- Ibrahim Hosen. (1971). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*. Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia.
- Imam Abi 'Abillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughir. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.

- M. Quraisy Syihab. (2002). *Tafsir al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Mudjab Mahali. (2002). *Asbabun Nuzul : Studi Pendalaman Al-Quran*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Quthb. (2002). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani.
- Sippah Chotban. (2016). *Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami*. 1-23.
- Yanto, Y., Hotimah, N., & Putri, K. B. (2018). "Status" Poligami Dalam Reinterpretasi. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(01), 251-264. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v4i01.3123>